



PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PERSENTASE PENDUDUK, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA

Elisa Florencia¹ Ni Luh Karmini²

Abstract

Keywords:

HDI;
Population;
Unemployment;
Poverty;

The problem that has yet to be addressed, both nationally and regionally, is poverty. The emergence of poverty is certainly influenced by several factors including uncontrolled population growth, high unemployment, low Human Resources (HR), and Natural Resources (NR) that are not utilized properly and correctly. The purpose of this study is to analyze the simultaneous and partial effect of the Human Development Index (HDI), the percentage of the population, and the unemployment rate on poverty in the Regency/City of Papua Province. This study uses secondary data with panel data analysis method consisting of cross section data and time series data for districts/cities in Papua Province with a total of 145 research data. Research with fixed effect model shows that simultaneously HDI, percentage of population, and unemployment rate have an effect on poverty in the Regency/City of Papua Province. Partially HDI has a negative and significant effect on poverty, the percentage of the population has a positive and significant effect on poverty, and the unemployment rate has a positive and significant effect on poverty in Papua Province.

Kata Kunci:

IPM;
Persentase Penduduk;
Tingkat Pengangguran;
Kemiskinan;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email: elflorenc@gmail.com

Abstrak

Persoalan yang masih harus ditangani sampai saat ini, baik secara nasional dan regional adalah kemiskinan. Timbulnya kemiskinan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, tingkat pengangguran yang tinggi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, dan Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang dimanfaatkan secara baik dan benar. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis data panel yang terdiri dari data cross section dan time series kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan jumlah penelitian 145 data. Penelitian dengan model fixed effect menunjukkan bahwa secara simultan IPM, persentase penduduk, dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Secara parsial IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, persentase penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, serta tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua.

PENDAHULUAN

Persoalan yang masih harus ditangani sampai saat ini, baik secara nasional dan regional adalah kemiskinan. Untuk dapat mengatasi kemiskinan tentunya dibutuhkan macam-macam cara untuk menyelesaikannya, serta perlu dilakukan secara merata. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini perlu dilaksanakan secara terpadu, maka dari itu dibutuhkan berbagai kebijakan didalam pelaksanaannya (Nasir,dkk 2008). Sejak pertengahan 1980-an, pembuat kebijakan dan akademisi telah menggunakan statistik kemiskinan BPS untuk memandu alokasi dana publik dan untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan (Priebe, 2014).

Timbulnya kemiskinan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, tingkat pengangguran yang tinggi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, dan Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang dimanfaatkan secara baik dan benar. Ismawan dalam Suhartini (2014) mengatakan bahwa ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan pertama yang dapat dilakukan yaitu memberikan bantuan langsung kepada penduduk miskin, sedangkan pendekatan kedua yaitu dengan menggunakan keuangan mikro. Pendekatan ini dapat dikatakan cukup efektif karena dapat membantu penduduk miskin secara langsung. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya penduduk miskin yang tidak mempunyai kualitas yang mempuni, sehingga produktivitas yang dihasilkan cenderung rendah, yang kemudian berpengaruh kepada pendapatan mereka. Ketika pendapatan penduduk yang dihasilkan rendah, mengakibatkan penduduk kurang bisa mencukupi keperluan kehidupannya sehari-hari baik secara sandang, pangan, dan papan, yang akhirnya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah (Seran, 2017).

Menurut Todara dalam Barat dan Rosa (2014) pembangunan serta pertumbuhan ekonomi bukan hanya tertuju pada peningkatan PDRB, melainkan juga untuk mengatasi kemiskinan. Studi yang berfokus pada hubungan antara pengeluaran kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi cenderung setuju bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan telah menguntungkan masyarakat miskin, dan bahwa Indonesia memiliki elastisitas pertumbuhan kemiskinan yang tinggi dan stabil, bahkan setelah krisis 1997–1998 (Sumner & Edward, 2014).

Tabel 1.
Persentase Penduduk Miskin Menurut Beberapa Provinsi di KBI dan KTI Tahun 2019

Kawasan Barat Indonesia		Kawasan Timur Indonesia	
Provinsi	Persentase Penduduk Miskin	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin
Sumatera Barat	6.42	NTT	21.09
Kep. Bangka Belitung	4.62	Sulawesi Tengah	13.48
Bali	3.79	Gorontalo	15.52
Kalimantan Selatan	4.55	Maluku	17.69
Kalimantan Timur	5.94	Papua	27.53

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Indonesia memiliki 34 provinsi yang telah ditetapkan Permendagri No. 56-2015, kemudian provinsi-provinsi ini dapat dibagi menjadi dua wilayah yang disebut Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui perbedaan persentase

penduduk miskin pada beberapa provinsi di KBI dan KTI pada tahun 2019. Pada KBI persentase penduduk miskin tidak lebih dari sepuluh persen penduduk miskin, sedangkan pada KTI persentase penduduk miskin melebihi sepuluh persen.

Permasalahan kemiskinan yang lebih besar pada beberapa provinsi di KTI dibandingkan dengan KBI terjadi dikarenakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan, jika dilihat pada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi pada provinsi di wilayah KBI jauh lebih cepat meningkat karena didukung oleh infrastruktur, sarana transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih tercukupi dibandingkan dengan wilayah KTI. Jika dilihat pada tabel 1, Provinsi Papua merupakan provinsi pada wilayah KTI yang dimana persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di tahun 2019 yaitu sebesar 27.53 persen.

Tabel 2.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2015	859.15	28.17
2016	911.33	28.54
2017	897.69	27.62
2018	917.63	27.74
2019	926.36	27.53

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua, 2021

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat jumlah penduduk miskin serta persentase penduduk miskin di Provinsi Papua periode tahun 2015-2019 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 859.15 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin 28.17 persen. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 911.33 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin 28.54 persen. Namun di tahun 2017 jumlah penduduk miskin kembali turun sebesar 897.69 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin 27.62 persen. Kemudian pada tahun 2018 meningkat kembali dengan jumlah penduduk miskin 917.63 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin 27.74 persen, dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin kembali meningkat sebesar 926.36 ribu jiwa namun persentase penduduk miskin menurun menjadi 27.53 persen.

Provinsi Papua ditetapkan sebagai provinsi yang mempunyai otonomi khusus untuk daerahnya sendiri. Provinsi ini telah menerima otonomi khusus sejak tahun 2001 yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. UU No. 21 tahun 2001 pada pasal 1 angka 1 membahas otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua, didalamnya tertulis bahwa Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi penerima otsus yang dapat mengelola serta menjalankan kepentingan penduduknya menurut gagasan daerahnya berasaskan pandangan dan hak-hak masyarakat Papua. Maka dari itu dapat diketahui bahwa otonomi adalah hak yang diberikan untuk masyarakat dengan etnis tertentu, yang tidak memiliki kewenangan (politik) tersendiri untuk menjalankan yuridiksi eksekutif (Warouw, 2016).

Untuk penyamarataan ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia, Provinsi Papua tidak hanya menerima otonomi khusus bagi daerahnya, banyak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memajukan daerah tersebut. Kebijakan yang diberikan diantaranya yaitu: (a) Instruksi Presiden No.5 Tahun 2007 yang berisikan tugas untuk mempercepat pembangunan pada wilayah Papua dan Papua Barat; (b) Instruksi Presiden No.9 Tahun 2017 mengenai percepatan

pembangunan dalam hal kesejahteraan dalam bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital, dan pengembangan ekonomi lokal; (c) Inpres No.9 Tahun 2020 berisikan tugas yang dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkewajiban memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang unggul di Provinsi Papua, yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta indeks kemahalan; (d) RPJMN pada Tahun 2015-2019 memberikan pengkhususan bagi Provinsi Papua sebagai salah satu lokus pembangunan yang utama dengan strategi berlandaskan wilayah adat (Deda & Mofu, 2014).

Infrastruktur merupakan salah satu elemen dasar terpenting yang dibutuhkan oleh suatu daerah karena dapat membantu serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Pada dasarnya infrastruktur ini mengacu pada bentuk fisik seperti transportasi, bangunan, air, dan fasilitas publik. Infrastruktur yang tersedia tidak serta merta hanya berguna bagi masyarakat, namun juga berguna dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari sisi kerajinan tangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Pembangunan pada infrastruktur ini sebaiknya dapat dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, supaya suatu daerah menjadi semakin maju (Sampelalong & Sukartini, 2020).

Menurut (Yusuf & Sunmer, 2015) investasi fisik infrastruktur dapat memberikan akses yang lebih besar kepada kaum miskin terhadap kesempatan kerja. Bahkan mungkin menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk pekerja tidak terampil daripada pekerja terampil dan efek pengganda local sangat mungkin terjadi (misalnya, peluang bagi penjual makanan pinggir jalan di dekat lokasi konstruksi).

Tujuan dari diberikannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua yaitu agar tercapainya percepatan pembangunan supaya masyarakatnya dapat sejahtera secara. Pembangunan yang dimaksudkan salah satunya ialah pembangunan infrastruktur seperti jalan, hal ini diperlukan supaya nantinya masyarakat setempat dapat lebih mudah untuk melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya, terlebih bagi mereka yang tinggal pada wilayah terpencil atau terisolasi. Serta pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Papua (Harianja, dkk, 2018).

Namun setelah dilihat ternyata persentase penduduk miskin di Papua masih cukup tinggi meskipun sudah memiliki otonomi khusus bagi daerahnya sendiri dan juga beberapa peraturan pemerintah mengenai percepatan pembangunan. Lantas perlu ditemukan apa-apa saja faktor yang dapat mengakibatkan meningkatnya persentase penduduk miskin. Menurut beberapa penelitian yang telah ada, menunjukkan bahwa beberapa faktor yang berperan dalam menimbulkan kemiskinan adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia), tingkat penduduk dan tingkat pengangguran.

IPM merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kemiskinan dikarenakan, dengan melihat angka IPM kita dapat mengetahui bagaimana kualitas SDM pada suatu daerah. IPM terbagi menjadi empat kelompok dengan kriteria rendah ($< 60\%$), sedang ($60\% \leq \text{IPM} < 70\%$), tinggi ($70\% \leq \text{IPM} < 80\%$), sangat tinggi ($\geq 80\%$). Semakin rendahnya IPM maka dapat dikatakan semakin rendah juga produktivitas masyarakatnya, sehingga pendapatan yang mereka hasilkan cenderung kecil, dan tidak dapat mencukupi keperluannya sehari-hari. Keadaan ini yang akhirnya meningkatkan angka kemiskinan pada suatu daerah, karena walaupun pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tinggi namun kesejahteraan masyarakat rendah, maka dapat dinyatakan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan kurang berkualitas.

Menurut Suartha (2017) meningkatnya pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, yang kemudian memicu investasi sehingga lapangan pekerjaan semakin bertambah.

Keadaan ini yang kemudian membuat penduduk yang tinggal di daerah dengan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan yang rendah berpindah tempat ke daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi.

Selain IPM, faktor lain yang dapat menimbulkan permasalahan kemiskinan yaitu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Jika pertumbuhan penduduk diimbangi dengan kualitas penduduk yang semakin baik serta sumber daya pangan yang meningkat, tentunya tidak akan menimbulkan kemiskinan pada suatu daerah. Apabila dilihat di Indonesia tentunya masih sedikit pertumbuhan penduduk yang didampingi dengan perbaikan kualitas hidup, dilihat dari sisi fertilitas masih terdapat beberapa masyarakat yang berpandangan bahwa banyaknya anak yang dimiliki dapat menghasilkan banyak rezeki, sehingga mereka kurang mempertimbangkan hal-hal penting seperti ekonomi untuk kemudian dapat mensejahterakan kehidupannya.

Ketika masyarakat sadar akan kebutuhan hidupnya, tentunya mereka akan berusaha untuk menjadi penduduk yang produktif. Penduduk produktif ini nantinya mampu menurunkan angka kemiskinan, karena mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik makanan maupun non makanan, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerahnya (Samputra & Munandar, 2019). Permasalahan yang kemudian harus dihadapi yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai untuk menyerap semua tenaga kerja yang ada. Ketika tenaga kerja yang tersedia tidak dapat diserap dengan baik, maka yang terjadi adalah banyaknya masyarakat yang menganggur, yang kemudian dapat berpengaruh pada permasalahan kemiskinan.

Menurut Sukirno (2015), pengangguran merupakan keadaan pada seseorang yang telah dinyatakan sebagai bagian dari angkatan kerja namun mereka belum mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan sangat dibutuhkan supaya nantinya mereka dapat memakmurkan kehidupannya yang berasal dari pendapatan yang mereka terima. Pendapatan dapat dikatakan mencapai titik maksimum apabila para pekerja dapat memiliki pekerjaan dengan jumlah jam kerjanya yang penuh atau tiga puluh lima jam dalam seminggu.

Haughton and Khandker dalam Dariwardani (2014) mengatakan bahwa ada beberapa manfaat yang didapatkan melalui studi kemiskinan dinamis, diantaranya yaitu untuk dapat membuat kebijakan secara tepat sasaran, maka dari itu diperlukannya pemisahan antara rumah tangga miskin yang hanya sementara saja dengan rumah tangga miskin berkesinambungan. Dari kebijakan yang diberikan ini tentunya perlu dilihat bagaimana dampak yang terjadi, sehingga nantinya dapat dilakukan evaluasi secara berkala. Studi kemiskinan dinamis ini juga dapat dilakukan untuk memahami bagaimana tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu supaya pembuat kebijakan dapat menyesuaikan dengan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis pengaruh secara simultan IPM, persentase penduduk, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua; 2) Menganalisis pengaruh secara parsial IPM, persentase penduduk, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

Pendekatan berwujud asosiatif digunakan pada riset ini secara kuantitatif. Tujuan riset yakni mengetahui korelasi dari beberapa kelompok diantaranya yaitu pengaruh IPM, persentase penduduk, dan tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota terhadap kemiskinan Provinsi Papua. Riset ini mengenakan sumber panel data dengan sekunder data. Panel data merupakan kombinasi data *cross*

section dan *time series*. Data yang digunakan sebanyak 29 Kabupaten/Kota untuk *cross section* di Provinsi Papua serta penggunaan rentang waktu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam kurun waktu 5 tahun. Jadi, 145 data terkumpul diamati pada riset ini. Data terkumpul merupakan data keperluan variabel di Provinsi Papua Kabupaten/kota. Pengumpulan data menggunakan metode pengamatan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan parameter yang telah ditetapkan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM tertinggi di Provinsi Papua terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah 60,84% dan yang terendah pada tahun 2015 sebesar 57,25 persen. Dengan IPM 60,84% di tahun 2019 membuat Provinsi Papua memasuki posisi tingkat pertumbuhan sedang menurut standar UNDP (*United Nations for Development Program*).

Badan Pusat Statistik (2019) menentukan bahwa yang dimaksud dengan penduduk adalah mereka yang tinggal di daerah Indonesia selama enam bulan lebih maupun kurang, namun bermaksud untuk bertempat tinggal di daerah Indonesia. Perkembangan penduduk di Provinsi Papua sangat terkendali. Sepanjang tahun 2015-2019, pertumbuhannya hanya 1,78% per tahun, sehingga pada tahun 2019 tercatat penduduk Papua sebesar 3,38 juta jiwa (Bappeda Papua, 2020). Mengacu pada data BPS, penduduk Papua terkonsentrasi pada 4 (empat) daerah urban terbesar. Ke-4 daerah yang dimaksud adalah Kota Jayapura (8,9%), Kabupaten Merauke (6,7%), Jayawijaya (6,5%) dan Mimika (6,5%).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah masyarakat yang menganggur dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Menurut data yang dipublikasikan oleh BPS Papua, dapat diketahui tingkat pengangguran terbuka yang mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019 di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,98 persen, kemudian menurun hingga tahun 2018 menjadi 3,20 persen, pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 3,65 persen. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka menunjukkan usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran dari tahun 2015-2019 belum berhasil.

Menurut Nugraha (2020) yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan di saat penduduk tidak dapat mencukupi kebutuhan hariannya yang berupa makanan dan bukan makanan. Menurut data yang dipublikasikan oleh BPS Papua, dapat diketahui kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua yang mengalami penurunan meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen, dari yang sebelumnya di tahun 2015 persentase penduduk miskin sebesar 28,17 meningkat menjadi 28,54 di tahun 2016, namun kemudian terus menurun hingga pada tahun 2019 menjadi 27,53.

Untuk mengetahui model yang tepat pada regresi data panel, maka dilakukan uji chow, uji hausman, dan uji la grange multiplier. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan *Cross-section chi-square* sebesar $0.0000 < \alpha 0.05$ pada uji chow yang berarti H_a diterima. Maka dapat ditetapkan bahwa *fixed effect* merupakan metode yang sesuai dalam riset dan cara yang cocok untuk melakukan uji regresi.

Tabel 3.
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: KAB			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	506.851272	(28,111)	0.0000
Cross-section Chi-square	694.791653	28	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data EViews 9, 2021

Supaya tidak terjadi penyelewengan atau bias dari beberapa asumsi yang harus terpenuhi dalam metode *Ordinary Least Square* (OLS), maka dilakukanlah uji asumsi klasik. Terdapat empat uji asumsi klasik, namun karena riset ini menggunakan data panel jadi uji yang dilakukan hanya uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas merupakan salah satu uji untuk melihat apakah ada terjadi ketidaksamaan model dari residual pengamatan-pengamatan lainnya. Hasil uji menunjukkan bahwa pada tiap variabel independen memperoleh nilai probability > 0,05 yang berarti data terbebas dari indikasi heteroskedastisitas. Uji Mulikolinearitas memiliki tujuan untuk menyelidiki adakah hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diketahui variabel independen koefisiennya < 0,90 yang dapat diartikan tidak adanya multikolinearitas pada data di riset ini.

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.932.139	6.633.421	5.927.770	0.0000
IPM	-0.193942	0.049224	-3.939.976	0.0001
Persentase Penduduk	3.146.522	1.731.357	0.181737	0.8561
Tingkat Pengangguran	-5.768.312	2.438.960	-2.365.070	0.0198

Sumber: Hasil Olah Data EViews 9, 2021

Pengujian dengan EViews 9 untuk mendapatkan hasil analisis regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel 4, memperoleh persamaan model regresi:

$$PE = 3.932.139 - 0.193942 X1 + 3.146.522 X2 - 5.768.312 X3 \dots\dots\dots(1)$$

Hasil analisis uji statistik yaitu Uji F didapatkan probabilitas 0,000001 < 0,05 yang artinya variabel IPM (X1), persentase penduduk (X2), dan tingkat pengangguran (X3) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan EViews 9 memperoleh probabilitas 0.0001 < 0.05 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara IPM terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2015-2019. Koefisien yang bernilai negatif dengan nilai - 0.1939 menunjukkan IPM memiliki dampak yang negatif terhadap kemiskinan. Maka dapat dikatakan, ketika IPM mengalami kenaikan satu persen maka kemiskinan dapat turun sebesar 0.1939. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, riset ini sepaham dengan hasil riset yang dilakukan oleh

Nainggolan, dkk (2020) dalam risetnya dengan judul “*Factors Affecting Poverty in North Sumatra*” dan penelitian Rahayu (2018) yang mengatakan bahwa adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara IPM dengan kemiskinan di Sumatera Utara.

IPM yang memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan menjelaskan bahwa semakin baiknya pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Provinsi Papua. Hasil dari pengujian ini didukung dengan data BPS yang menunjukkan adanya tren peningkatan pada IPM disertai dengan penurunan angka kemiskinan di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Terbukti dengan (AHH) Angka Harapan Hidup penduduk di Provinsi Papua yang terus meningkat dari tahun 2010 sebesar 64,31 persen menjadi 65,79 persen pada tahun 2020. AHH diketahui menjadi parameter pembangunan dalam bidang kesehatan selain tingkat kekurangan nutrisi, tingkat fertilitas, dan tingkat mortalitas anak dibawah umur lima tahun (Kharisma, dkk 2020).

Pengujian yang dilakukan menggunakan EViews 9 memperoleh hasil probabilitas $0.8561 > 0.05$, maka dapat dikatakan penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada meningkatnya kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2015-2019. Nilai koefisien bernilai positif sebesar 3.146 menunjukkan adanya hubungan yang positif antara penduduk dengan kemiskinan. Maka dari itu dapat dikatakan apabila penduduk mengalami kenaikan satu persen maka kemiskinan dapat naik sebesar 3.146. Berdasarkan hasil yang didapatkan, riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang telah dilakukan oleh Runtunuwu & Tanjung (2020), dimana dalam riset tersebut menyatakan jika jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kemiskinan di wilayah/kota Sulawesi Utara. Namun dengan hasil yang tidak signifikan, penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Muliza (2020), penelitian Agustina (2018), serta penelitian Fadlillah (2016) yang mengatakan bahwa penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Menurut Jhingan (2004) pada suatu keadaan tertentu pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan kondisi yang disebut keadaan stasioner. Keadaan ini dapat dilihat ketika pembangunan ekonomi sama sekali tidak terjadi, yang kemudian mengakibatkan perekonomian dapat terus merosot ke derajat terendah dimana upah menjadi sangat minim, hanya mampu untuk penghidupan. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat. Namun pada riset ini tidak didapatkan hasil yang signifikan antara penduduk dengan kemiskinan, penyebabnya karena bertambahnya penduduk diiringi dengan kualitas kehidupan yang semakin membaik pula. IPM yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa semakin baiknya kualitas SDM di Provinsi Papua.

Pengujian dengan eviews 9 memperoleh hasil probabilitas $0.0198 < 0.05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2015-2019. Nilai koefisien bernilai negatif sebesar -5.768 menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara pengangguran dengan kemiskinan. Maka dari itu dapat dikatakan apabila pengangguran mengalami kenaikan satu persen maka kemiskinan dapat turun sebesar 5.768. Berdasarkan hasil yang didapatkan, riset ini tidak berbanding lurus dengan hipotesis yang telah diajukan. Riset ini tentunya juga tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Novianto dan Sudarsono (2018) dimana dalam riset tersebut menyatakan jika pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kemiskinan.

Beberapa faktor penyebab bertambahnya tingkat pengangguran namun tidak meningkatkan kemiskinan diantaranya yaitu: (a) Penduduk yang menganggur dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari baik makanan maupun non makanan; (b) Maraknya pekerjaan tidak tetap (*freelance*) melalui daring dan luring dengan waktu kerja yang fleksibel dan pendapatan yang cukup tinggi membuat masyarakat kurang meminati pekerjaan penuh waktu seperti Pegawai Negeri Sipil

(PNS). Dengan begitu penduduk ini dapat dikatakan pengangguran terselubung yang dimana jumlah jam kerjanya lebih sedikit atau kurang dari 35 jam dalam seminggu; (c) Bertambahnya jumlah penduduk yang telah lulus dari universitas negeri maupun swasta mengakibatkan meningkatnya pengangguran yang terdidik (Ihsan & Ikhsan, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Bersumber pada hasil riset yang telah dilakukan serta dideskripsikan, lantas dapat ditemukan beberapa jawaban untuk menanggapi rumusan masalah yang telah diajukan. Hasil olah data menunjukkan bahwa variabel IPM, persentase penduduk, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Secara parsial IPM dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Variabel persentase penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

Dengan adanya hasil riset serta kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat dipaparkan diantaranya yaitu, pemerintah dihimbau agar dapat menggunakan dana otsus lebih baik lagi terhadap bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, sehingga nantinya dapat meningkatkan IPM di Provinsi Papua. Meskipun IPM di Provinsi Papua terus meningkat setiap tahunnya dan sudah menyentuh angka 60 persen, namun Provinsi Papua memiliki IPM paling rendah dibandingkan dengan IPM pada 33 Provinsi di Indonesia lainnya. Dengan semakin meningkatnya IPM tentunya berdampak pada kualitas penduduk yang semakin baik, dan dapat semakin berkurangnya angka pengangguran di Provinsi Papua. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta juga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan pelatihan maupun pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat semakin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Provinsi Papua, sehingga dapat mengembangkan wilayahnya dan mengupayakan hasil dari daerahnya sendiri. Serta diharapkan untuk para peneliti selanjutnya agar dapat meningkatkan lagi hasil penelitian ini dengan meninjau beberapa variabel lain seperti, infrasturuktur wilayah, upah minimum, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan pendidikan.

REFERENSI

- Dariwardani, N. M. I. (2014). Analisis Dina mika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008-2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(1), 44-305.
- Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014). Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya: Sebuah kajian etnografi kekinian. *Jurnal administrasi publik*, 11(2), 1-10
- Harianja, Y., Sahara., & Findi.M. (2018). Tingkat Kemiskinan di Pulau Papua Tahun 2011-2017. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 189-200.
- Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Journal Publicuho*, 3(1), 1-20.
- Nasir, M. M., Saichudin., & Maulizar. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif*, 5(4), 1-11
- Priebe, J. (2014). Official poverty measurement in Indonesia since 1984: A methodological review. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 185-205.

- Sampelalong, E., & Sukartini, N. M. (2020). Infrastructure and Development. *Gorontalo Development Review*, 3(1), 14-27.
- Samputra, P. L., & Munandar, A. I. (2019). Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 35-46.
- Seran, S. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1), 59-71.
- Suartha, N., & Yasa, I. G. W. M. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk and Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*, 10(2), 95-107.
- Sukimo, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumner, A., & Edward, P. (2014). Assessing Poverty Trends in Indonesia by International Poverty Lines. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 207-225.
- Warouw, S. (2016). Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, poverty, and inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323-348.
- Yuta, R., & Suhartini, A. M. (2014). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 44318.